



Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang

Maulidatul Hasanah¹, Mohammad Djasuli²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Received: 20 April 2025
Revised: 27 April 2025
Accepted: 01 Mei 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. SIPD adalah sistem informasi yang digunakan pada pemerintahan Kabupaten Sampang sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Namun penerapan SIPD khususnya di Kabupaten Sampang, belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang. Selain itu karena kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang diperlukan untuk melakukan bimbingan teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Sampang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai hal kegiatan yang merupakan program dari pemerintah Kabupaten Sampang.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(* Corresponding Author:

How to Cite: Hasanah, M., & Djasuli, M. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 156-164. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10402>.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada Era revolusi industri 4.0 mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dalam hal pengelolaan organisasi sektor publik, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan pekerjaan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan efisien (Muttaqin et al., 2023). Penerapan kemajuan teknologi di bidang pemerintahan salah satunya mendukung proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka pemerintah daerah harus berinovasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Pasulu et al., 2022). Dalam rangka melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah (Manoe et al.,

2023). Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik, namun dalam menjalankan program ini tidak mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah (Hasanah et al., 2023). Dengan munculnya Peraturan baru tersebut, maka seluruh SKPD di Indonesia diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat (Nasution & Nurwani, 2021). SIPD juga diperlukan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerjasama basis teknologi untuk membangun data base di daerah serta dapat mendeskripsikan kapasitas dan sumberdaya di daerah guna memberi kontribusi terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan valid. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien (Laoli et al., 2022). Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Implementasi aplikasi dengan basis web ini dengan tujuan untuk mempermudah serta mempercepat pelayanan publik, menyajikan informasi keuangan/laporan keuangan yang valid dan akuntabel dan bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan (Muttaqin et al., 2023). Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu, karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada BPPKAD Kabupaten Sampang, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering eror sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi adalah keterjadian setelah sebuah undang-undang ditetapkan. Istilah implementasi merupakan penerapan akan sebuah perundangan yang tengah diberlakukan dengan tujuan tertentu (Akib, 2010). Implementasi analisis pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar, manfaat, faktor pendukung dan penghambat, metodologi implementasi, serta evaluasi dan monitoring SIPD. Implementasi suatu kebijakan publik adalah salah satu kegiatan yang di proses tersebut untuk memastikan suatu kebijakan berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam proses kebijakan publik sebuah implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting (Nasution & Nurwani, 2021). Agar tujuan yang diinginkan

dapat tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi.

Setelah tahap formulasi kebijakan dilalui, Implementasi bisa disebut pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang terdapat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah yang konkrit. Hal ini disimpulkan bahwa meskipun perencanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik, tetapi dalam implementasinya tidak optimal maka akan tidak menemui kejelasan apa, dengan kata lain harapannya kebijakan tersebut membawa kemajuan (Muttaqin et al., 2023). Hingga akhirnya dapat dipastikan bahwa dalam evaluasi kebijakan, akan menciptakan penilaian bahwa jika implementasi kebijakan tidak sejalan, maka kebijakan itu sendiri akan menjadikan sebagai penghalang bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

A Model of the Policy Implementation adalah model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975). Sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable adalah model proses implementasi ini. Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Nasution & Nurwani, 2021). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh variable-variabel yang saling berkaitan, secara rinci berbagai variabel tersebut yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Karakteristik organisasi pelaksana
- d) Komunikasi antar organisasi
- e) Disposisi atau sikap para pelaksana
- f) Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan sinergi antara teknologi informasi dan penggunaannya (Balqis & Fadhly, 2021). Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya berdasarkan informasi yang dihasilkan tetapi juga dilihat dari ketepatan waktunya juga (Yanto et al., 2023). Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar (Manoe et al., 2023): tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*). Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (*garbage*).

Sistem informasi menurut Gordon B. Davis (1991:91) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Dengen & Hatta, 2009). Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi

diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat (Balqis & Fadhly, 2021). Tujuan utama dari implementasi SIPD adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Penggunaan teknologi di badan pemerintahan digunakan memberikan suatu pelayanan publik diutamakan untuk dilakukan karena dengan bantuan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi sehingga pengelolaan akan lebih cepat, tidak terbatas dengan jarak dan waktu (Muttaqin et al., 2023).

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat (Nasution & Nurwani, 2021). Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1). Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2). Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi.

Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi :

- a. Perencanaan Anggaran Daerah,
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan daerah,
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah,
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan daerah,
- e. Barang Milik Daerah,
- f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Bogan dan Tylor dalam buku Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam menangani Aplikasi SIPD. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
2. Ketua Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Sampang

Fokus Penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting karena fokus penelitian dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah yang terjadi.

Berdasarkan pemikiran diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sampang dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yakni :

1. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang sebagai badan yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Pasulu et al., 2022). Namun, dibalik harapan tersebut dalam penerapannya SIPD ternyata belum sempurna masih banyak kendala dan kekurangan dalam penerapannya sehingga banyak tugas dan tanggung jawab yang mengalami masalah dan keterlambatan dalam pengerjaannya. Maka dari itu peran, kritik dan saran dari Pemerintahan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pelaksana SIPD sangat dibutuhkan untuk membantu proses pengembangan SIPD. Untuk mengetahui mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPPKAD Kabupaten

Sampang, penulis menggunakan teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai fokus penelitian yaitu :

1. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Seperti yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Sampang telah menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Sampang. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang di dapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di upgrade agar berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi.

2. Sumber daya

Menurut Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1975) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia adalah kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah manusia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya peran sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara sistematis dan apolitis. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan Badan pengelola keuangan dan asset daerah kota medan mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan kebanyakan yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah, namun BPPKAD Kabupaten Sampang harus lebih siap disaat terjadi pergantian kepemimpinan agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat di input sehingga tidak terjadi keterlambatan, adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik jaringan wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga badan BPPKAD Kabupaten Sampang tidak kuatir lagi dalam penginputan data meskipun masih banyak kekurangan di dalam sistem informasi berbasis web ini.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Hal yang penting dalam pengimplentasian kebijakan adalah pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen-agen selaku eksekutornya. Pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin dituntut untuk melaksanakan beberapa kebijakan. Agen pelaksana yang demokratis dan persuasive juga diperlukan dalam konteks lain. Selain itu, pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan adalah cakupan atau luas wilayah.

Untuk menjalankan suatu program kegiatan maka kerjasama sangat diperlukan dalam mewujudkannya koordinasi yang jelas dan teratur pula penunjang dalam keberhasilan suatu program kegiatan, pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini BPPKAD sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dimana orang yang terlibat didalamnya mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan agar kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah agar terintegrasi dengan baik.

4. Komunikasi antar organisasi

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo : 2007) agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan yakni para individu (*implementors*), maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para *implementors*. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi dipakai agar hubungan antara 2 instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa untuk terwujudnya suatu implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Sampang salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dalam mewujudkan informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu tepat kepada orangnya, tepat waktu dan tepat nilainya dan untuk tercapai semuanya itu maka diperlukan kerja sama dari setiap perangkat daerah Kabupaten Sampang harus bekerja sama dalam mewujudkannya.

Sistem ini memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Namun agar terwujudnya tujuan-tujuan tersebut harus diperlukan persiapan dari setiap satuan kerja perangkat daerah baik kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya penunjang yaitu sarana dan pra sarana karena kalau perangkat daerah tidak sigap dalam menghadapi perkembangan saat ini maka daerah tersebut akan ketinggalan dan sulit untuk berkembang dan pusat pun akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Meskipun dalam penerapannya sistem ini masih banyak mengalami kendala dan itu sangat menyebabkan keterlambatan bagi proses kinerja pegawai, sistem ini menuntut pemerintah pusat untuk segera memperbaiki dan mengurangi kendala-kendala yang berpotensi mendapatkan banyak kritik. Untuk itulah komunikasi sangat penting agar proses perbaikan sistem ini bisa berjalan cepat, maksimal dan sustainable.

5. Disposisi dan sikap para pelaksana

Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa (dalam Agostino 2006): "Pengaruh keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik sangat bergantung dari sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang sangat mengenal bentuk permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi

kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Keberhasilan suatu program salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksana kebijakan, Implementor yang memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang di berikan maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan didaerah itu sangat tinggi, dalam menjalankan kebijakan yang sudah di sepakati bersama maka tidak terhindar dari berbagai masalah dan kendala dalam proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan didapati dalam proses penelitian masih ada keterlambatan, hal ini menyebabkan masalah yang ada di penatausahaan, karena di penatausahaan belum siap proses GU, TU, maupun proses pergeseran anggaran jadi terkendala karena sistemnya belum berkompeten untuk langsung diterapkan di tahun ini. Maka dari itu pemerintah pusat selaku pembuat sistem dan pembuat aturan tentang kewajiban menerapkan sistem ini harus cepat melakukan perbaikan-perbaikan agar proses kinerja yang dilakukan di setiap pemerintahan daerah tidak terkendala karena sistem yang masih banyak kekurangan.

6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Di dalam lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang sendiri, kondisi sosial, politik dan ekonomi berjalan harmonis dan berkembang sebagaimana mestinya. Walaupun dalam beberapa bulan terakhir Kabupaten Sampang melaksanakan pemilu dan pemimpin yang berganti, itu tidak menyurutkan keharmonisan dan keseimbangan kondisi sosial, politik dan ekonomi di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang. Hal ini tentunya sangat baik, BPPKAD selaku badan yang mengurus keuangan dan asset di kota ini tentu sangat sensitif apabila terjadi ketidakharmonisan dalam proses berjalannya kegiatan, apalagi yang di kelola adalah harta milik rakyat. Namun, dengan keharmonisan yang terjadi saat initemu ini menjadi cerminan masyarakat bahwa BPPKAD profesional dalam menjalankan amanah mereka sebagai pelayan bagi masyarakat di Kabupaten Sampang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, maka dapat disampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Sampang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Berdasarkan informasi yang didapatkan Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

SARAN

1. Untuk Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pemerintah daerah karena masih kurangnya dalam proses penggunaan aplikasi ini, dan diberikan sumber daya lebih bagi SKPD yang menangani kegiatan tersebut.
2. Untuk peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya serta menambah wawasan mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BPPKAD Kabupaten Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 2310-2318.
- Pasulu, M., Hasliah, H., & Pragemini, P. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan (SIMRAL) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(1), 78-90.
- Manoe, D. S., Koten, Y. P., & Rozady, M. P. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Increate-Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi*, 9(1).
- Hasanah, U., Nirmala, D., Faradina, M. P., Aisyah, S., Hartatik, S. S., & Abrori, R. (2023). Pemberdayaan Peran Mahasiswa Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BPPKAD Kabupaten Sumenep Pada Program MKBM Magang Industri. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). IMPLEMENTASI SIPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS (STUDI KASUS BPKPD SEBAGAI LEADING SEKTOR PENGANGGARAN). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381-1389.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117-121.
- Yanto, E., Sahwan, S., & Prathomo, J. (2023). Implementation of regional government information systems in the regional financial management study at the tolitoli regency environmental service. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1647-1653.
- Hatta, N. D. H. R. (2009). Program Studi I Ilmu Komputer Universitas Mulaw arman Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.